

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Kabupaten Ngawi

##### 1. Sejarah Kabupaten Ngawi

Kata Ngawi berasal dari kata “awi”, bahasa sansekerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata “ng” sehingga menjadi Ngawi. Di Ngawi terdapat banyak pohon bambu yang menjadikan asal mula nama Kabupaten Ngawi tercetus, seperti halnya banyak nama daerah di Jawa yang berkaitan dengan flora, seperti ciawi, waringin pitu, pelem, pakis dan lain-lain.

Penelusuran hari Jadi Ngawi dimulai pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya SK Bupati KDH Tk. II Ngawi Nomor Sek. 13/7/Drh, tanggal 27 Oktober 1975 dan nomor Sek 13/3/Drh, tanggal 21 April 1976. Ketua Panitia dan penelusuran yang di ketuai oleh DPRD Kabupaten Dati II Ngawi. Dalam Penelitian berdasarkan sejarah, peninggalan purbakala, dan dokumen-dokumen kuno. Hasil dari penelitian tersebut :

- Pada tanggal 31 Agustus 1830, pernah ditetapkan sebagai Hari Jadi Ngawi dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi tanggal 31 Maret 1978, Nomor Sek.13/25/DPRD, yaitu berkaitan dengan ditetapkan Ngawi sebagai *Order Regentschap* Oleh Pemerintah Hindia Belanda.

- Pada tanggal 30 September 1983, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi nomor 188.170/2/1983, ketetapan diatas diralat dengan alasan bahwa tanggal 31 Agustus 1830 sebagai Hari Jadi Ngawi dianggap kurang Nasionalis, pada tanggal dan bulan tersebut dianggap memperingati kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.
- Menyadari hal tersebut pada tanggal 13 Desember 1983 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi nomor 143 tahun 1983, dibentuk Panitia/Tim penelusuran dan penulisan Sejarah Ngawi yang diketuai oleh Drs. Muestofa. Pada tanggal 14 Oktober di sarangan telah melaksanakan pertemuan membahas Hari Jadi Ngawi Oleh Bapak MM. Soekarto K. Atmodjo, dan Bapak MM. Soehardjo Hatmosoeprobo dengan hasil pertemuan sebagai berikut :
  - a. Hasil penelusuran Bapak Soehardjo Hatmosoeprobo tentang Piagam Sultan Hamengku Buwono tanggal 2 Jumadilawal 1756 Aj, Selanjutnya menetapkan bahwa pada tanggal 10 November 1828 M, Ngawi ditetapkan sebagai daerah Narawita (Pelungguh) Bupati Wedono Monco Negoro Wetan. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah Ngawi pada zaman kekuasaan Sultan Hamengku Buwono.
  - b. Hasil penelitian Bapak MM. Soekarto K. Atmodjo tentang tentang Prasasti Cangu tahun 1280 Saka pada masa pemerintahan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1358 M, Ngawi di tetapkan sebagai Naditirapradesa

(daerah penambangan) dan daerah swatantra. Peristiwa tersebut merupakan Hari Jadi Kabupaten Ngawi sepanjang belum diketahui data baru yang lebih tua.

Melalui Surat Keputusan nomor : 188.70/34/1986 tanggal 31 Desember 1986 DPRD Kabupaten Dati II Ngawi telah menyetujui tentang penetapan Hari Jadi Ngawi yaitu pada tanggal 7 Juli 1358 M. Dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi No. 04 Tahun 1987 pada tanggal 14 Januari 1987.

## 2. Geografi Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km<sup>2</sup>, sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km<sup>2</sup> berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21' – 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' – 111°40' Bujur Timur. Topografi wilayah Kabupaten Ngawi adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu.

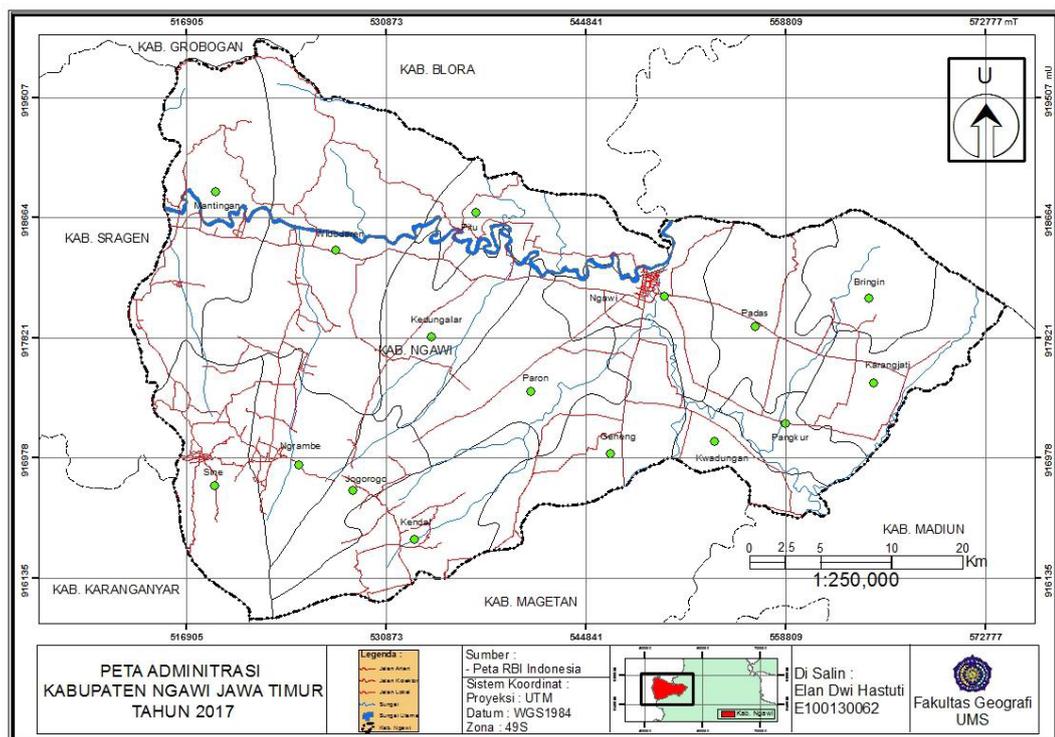
Kabupaten Ngawi adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten Ngawi ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) di barat. Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu.

### 3. Pembagian Administratif

Gambar 1

Peta Administrasi Kabupaten Ngawi



Gambar Peta Administrasi Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) Tahun 2017

Kabupaten Ngawi terdiri atas 19 kecamatan yang terbagi dalam 217 desa dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Ngawi. Berikut adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi :

1. Kecamatan Bringin
2. Kecamatan Geneng
3. Kecamatan Jogorogo
4. Kecamatan Karangjati
5. Kecamatan kedunggalar
6. Kecamatan kendal
7. Kecamatan Kwadungan
8. Kecamatan Mantingan
9. Kecamatan Ngawi
10. Kecamatan Ngrambe
11. Kecamatan Paron
12. Kecamatan Pangkur
13. Kecamatan Padas
14. Kecamatan Pitu
15. Kecamatan Sine
16. Kecamatan Widodaren
17. Kecamatan Karanganyar
18. Kecamatan Kasreman
19. Kecamatan Gerih

#### 4. Kependudukan

Kependudukan di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan sebesar 1,2 % Tahun 2010 tertinggi pada Kecamatan Paron sebesar 86.148 jiwa, tahun 2015 tertinggi pada Kecamatan Paron sebesar 87.404 jiwa, dan pada tahun 2016 tertinggi pada Kecamatan Paron sebesar 87.583 jiwa.

Jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2010 sebanyak 818.989 jiwa, sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 827.829 jiwa. Berikut adalah jumlah distribusi penduduk di Kabupaten Ngawi.

Tabel 1

#### Jumlah Distribusi Penduduk di Kabupaten Ngawi 2017

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
Sine	41.273
Ngrambe	39.111
Jogorogo	39.818
Kendal	44.422
Geneng	47.585
Gerih	33.909
Kwadungan	25.780
Pangkur	26.742
Karangjati	47.789
Bringin	31.176
Padas	32.834
Kasreman	24.153

Ngawi	82.925
Paron	87.583
Kedunggalan	66.821
Pitu	27.911
Widodaren	66.106
Mantingan	38.359
Karanganyar	24.484
Jumlah	828.783

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## 5. Transportasi

Kabupaten Ngawi dilintasi jalur utama Surabaya – Yogyakarta, jalur utama Cepu, Bojonegoro – Madiun dan menjadi gerbang utama Jawa Timur jalur selatan. Kabupaten Ngawi juga dilintasi jalur kereta api Jakarta – Yogyakarta – Bandung / Jakarta, namun tidak melewati ibu kota kabupaten. Stasiun kereta api terdapat di Geneng, Paron, Kedunggalan, dan Walikukun. Disamping itu dari jalur tengah yang menghubungkan Solo ke Ngawi ada beberapa jalur jalan klas III yang kemudian saling berkaitan dari barat, mantingan – sine – ngrambe, gendingan – walikukun – ngrambe – jogorogo, ke utara paron – ngawi, sedangkan jogorogo ke timur kendal – magetan, jalur ini sering dijadikan sebagai jalur alternatif apabila jalur utama mengalami gangguan misalnya banjir. Dari ngawi jalur pintas ke surabaya melalui karangjati – caruban – menuju ke surabaya.

## 6. Pendidikan

Dari sektor pendidikan di Kabupaten Ngawi terdapat Pondok Pesantren Gontor Putri 1, 2, 3 yang berada di Kecamatan Mantingan. Secara umum bidang pendidikan masih didominasi oleh sekolah negeri, terutama tingkat dasar. SD Negeri tersebar di semua desa melalui program SD Inpres. Sementara SMP Negeri masih terpusat di kota-kota kecamatan. Belum semua kecamatan terdapat SMA Negeri dan adanya beberapa SMA yang difavoritkan, hal ini menunjukkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Ngawi masih belum merata dan hanya terpusat di dalam kota. Kebanyakan siswa di Kabupaten Ngawi melanjutkan jenjang pendidikannya ke Perguruan Tinggi yang ada di luar kota seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, walaupun sebenarnya di Ngawi juga terdapat Perguruan Tinggi yaitu STKIP PGRI NGAWI, Universitas Soerjo, Akademi Keperawatan, dan STAI Ngawi.

## 7. Obyek Wisata

Tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Ngawi diantaranya adalah, Wisata Air Terjun Pengantin yang terletak di dusun Besek Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe, Pemandian Tawun, Waduk Pondok, Air Terjun Srambang, serta Kebun Teh Jamus yang memiliki lingkungan dan udara yang sejuk dan terdapat kolam pemandiannya. Perkebunan Teh terdapat di Kecamatan Sine, di sine juga terdapat perkebunan karet yang dikelola oleh PT. XXIII Tretes. Terdapat juga Situ Purbakala Trinil yang

menyimpan fosil *Pithecantropus erectus* (manusia kera berbadan tegak). Terdapat juga tempat wisata religi yaitu Gunung Liliran, serta masih banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya.

#### 8. Makanan Khas dan Kesenian

Kabupaten Ngawi mempunyai makanan khas yaitu tepo tahu, wedang cemue dan kripik tempe yang pengolahannya secara *home industry* terdapat di desa sadang Kecamatan Ngawi. Kabupaten Ngawi juga memiliki kesenian asli daerah yaitu Tari Orek-Orek, Tari Kecetan, dan Dongkrek Wayang Krucil.

### **B. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030**

Dalam rangka mendukung sistem Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Ngawi dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan tata ruang. Peraturan tentang penyelenggaraan tata ruang wilayah dapat mendukung terwujudnya sistem tata kota yang lebih baik.

Menurut Dwi Rianto Jatmiko S.H, Msi, Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Ngawi akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana setiap daerah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan di Kabupaten Ngawi dengan

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>40</sup>

Pasal 2 ayat (1) Perda RTRW Kabupaten Ngawi, dimana Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi ini mencakup tujuan, kebijakan, strategi, struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 3 dijelaskan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, industri dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan, dan penataan ruang kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai lumbung pertanian Jawa – Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Ngawi diantaranya :

1. Struktur ruang wilayah terdiri atas sistem pedesaan dan perkotaan, fungsi wilayah dan sistem perwilayahan.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko S.H, Msi, Tanggal 10 Juli 2018

2. Indikasi berkembangnya kawasan agropolitan merupakan prospek bagi fungsi dan kegiatan skala besar sehingga wilayah kabupaten semakin meningkat.
3. Perkembangan perkotaan sebagai pusat wilayah pengembangan (WP) baik sebagai WP 1 maupun WP 2 akan mendorong keserasian pengembangan wilayah dalam jangka panjang.
4. Berbagai infrastruktur wilayah dan mendorong pengembangan kawasan potensial.
5. Prasarana wilayah khususnya transportasi di Kabupaten Ngawi memiliki hubungan sistem Nasional dan Provinsi yang didukung oleh sistem jalan arteri primer.

Berdasarkan Pasal 6 Perda RTRW Kabupaten Ngawi Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian, dan terkoordinasinya

pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang mendukung telaksananya Perda Tata Ruang Kabupaten Ngawi.

### **C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaa Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030**

Upaya Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, diperlukannya komunikasi dalam organisasi yang merupakan hal sangat penting, tanpa adanya komunikasi implementasi tidak akan berjalan dengan maksimal.

Menurut Drs. Mohk. Sodiq Triwidiyanto M.Si, Dengan adanya komunikasi akan memberikan informasi terhadap semua pihak yang terkait dalam program yang ada di Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Kesalahan dalam pemahaman informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga akan menyebabkan perbedaan dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kabupaten Ngawi. Tahapan komunikasi merupakan langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Masyarakat yang tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu yang berkaitan langsung dengan Perda RTRW dalam implementasi sangat penting dalam mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Perda RTRW, pemerintah sebagai implementator mempunyai peran untuk mensosialisasikan Perda RTRW tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Mohk. Sodiq Triwidiyanto, Msi Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, tanggal 12 juli 2018

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mencakup semua bidang, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam implementasi kebijakan Perda RTRW Kabupaten Ngawi berperan untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi tidak satu arah, akan tetapi lewat komunikasi semua orang / implementator yang ada didalamnya dilibatkan sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang baik dan tepat sasaran. Perda tidak dapat dilepaskan dari indikasi program karena ini merupakan pedoman teknis yang menyangkut instansi pelaksana, pembiayaan, dan waktu, karena ini menyangkut penataan ruang wilayah yang di dalamnya terdapat unsur manusia, maka kesalahan informasi akan menimbulkan konflik.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi perihal Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, dimana staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, jumlah yang banyak tidak secara otomatis dapat mendorong implementasi berhasil. Kurangnya kecapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintahan ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Peran dari sumberdaya manusia dan anggaran sangat penting didalam proses implementasi kebijakan. Staf merupakan salah satu bagian yang ada didalam organisasi yang mempunyai peran penting dalam membantu mensukseskan setiap kegiatan. Terjadinya dampak yang kurang baik dalam

implementasi kebijakan RTRW karena kapasitas sumber daya manusia yang belum mampu. Untuk itu harus realistis dalam hal sumber daya yang ada untuk implementasi guna mendukung tercapainya suatu rencana. Dengan demikian sumber daya menjadi sangat penting. Sumber daya manusia, secara kualitas sumber daya implementator masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementator bisa lebih baik dalam melaksanakan kebijakan.<sup>42</sup>

Dari Hasil Penelitian yang di lakukan di BAPPEDA, bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah ada beberapa aspek, diantaranya adalah :

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perda, sebagai berikut :

Tabel 2

Permasalahan Tata Ruang di Kabupaten Ngawi

No	Bidang (Tata Ruang)	Permasalahan
1.	Pusat Pemukiman Pedesaan dan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemukiman pedesaan kurang mampu mendorong perkembangan wilayah.</li> <li>• Permasalahan dari kawasan agropolitan ini adalah masalah transportasi baik dari aspek sarana maupun prasarana</li> <li>• Pusat pelayanan pedesaan banyak yang kurang berkembang.</li> </ul>
2.	Pengembangan Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Ngawi memiliki kondisi wilayah yang berbukit-bukit, sehingga beberapa lokasi menjadikan pengembangan jalan</li> </ul>

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ibu Indah Kusuma Wardani selaku ketua BAPPEDA Kabupaten Ngawi, Tanggal 14 Juli 2018

		berdampak pada biaya dan teknologi yang lebih tepat.
3.	Kawasan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi kawasan terbangun, yang berarti bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian.</li> <li>• Kualitas dan hasil pengolahan belum optimal.</li> <li>• Banyaknya lahan sawah yang dilanda banjir sehingga sering kali mengakibatkan gagal panen dan hasil panen yang kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap produksi pertanian.</li> </ul>
4.	Kawasan Budidaya (Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya perubahan fungsi lahan perkebunan menjadi ladang kering, dan adanya penebangan tanaman perkebunan sehingga mengakibatkan penurunan tingkat produksi</li> <li>• Kualitas dan pengolahan hasil perkebunan masih belum optimal.</li> </ul>
5.	Kawasan Budidaya (Peternakan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedia pengelolaan yang layak terhadap limbah ternak.</li> <li>• Belum adanya pengolahan hasil peternakan.</li> <li>• Kurangnya sarana pendukung pengolahan komoditi ternak.</li> <li>• Minimnya lahan/lokasi untuk menggembalakan ternak.</li> </ul>
6.	Kawasan Budidaya (Perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan perikanan darat berupa perikanan air tawar di danau/waduk adalah berkurangnya debit air di saat musim kemarau, sehingga menghambat produktivitas.</li> <li>• Untuk pengembangan kawasan perikanan tambak permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya kualitas lahan untuk tambak akibat adanya pencemaran dari wilayah darat berupa sisa obat hama (pestisida) yang larut bersama air sungai atau air permukaan lainnya.</li> <li>• Kurangnya alternatif pengolahan (diversifikasi) untuk potensi</li> </ul>

		perikanan yang dimiliki Kabupaten Ngawi.
7.	Kawasan Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri yang ada tersebar ke beberapa lokasi sehingga kawasan industri kurang berkembang dan penggunaan lahan menjadi kurang efisien.</li> <li>• Keterbatasan modal dan keahlian mengakibatkan industri-insudtri kecil (<i>home industry</i>) tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar.</li> </ul>

Sumber : Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Ngawi

2. Kebijakan dan Strategis Kabupaten Ngawi dalam Implementasi Perda Perencanaan Tata Ruang, Sebagai berikut :

Tabel 3

Kebijakan Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

Perkotan	Kecamatan dan PPK	Fungsi Kawasan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
Karangjati (PKLp)	Karangjati	Pusat Perindustrian kecil dan menengah, pertanian.	240,4
	Padas	Pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata	
	Bringin	Perikanan darat, Perindustrian.	
	Pangkur	Pertanian, Peternakan	
	Kasreman	Pertanian, Peternakan	
Ngawi (PKL)	Ngawi	Pemerintahan, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil perindustrian, Pariwisata	289,04
	Geneng	Peternakan, Perikanan, Pertambangan	
	Paron	Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perindustrian	
	Kwadungan	Perikanan	
	Gerih	Peternakan	
	Widodaren	Peternakan, Perindustrian	
	Kedunggalar	Pendidikan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata	

Widodaren (PKLp)	Pitu	Produksi Pertambangan, Peternakan	289,04
	Mantingan	Perhubungan, Pariwisata, Industri, Pergudangan	
	Karanganyar	Perhubungan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan	
Ngrambe (PKLp)	Ngrambe	Pemasaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian, Perhubungan	288,11
	Jogorogo	Produksi Pertanian, Perkebunan, Perhubungan	
	Kendal	Perkebunan, Peternakan, Pertambangan, Pariwisata	
	Sine	Perkebunan, Peternakan	

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

Tujuan penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi adalah untuk meningkatkan keserasian ruang Kabupaten Ngawi. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi strategi terkait dengan, sistem perkotaan, fungsi wilayah, serta sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi. Strategi ini berkaitan dengan penetapan lokasi wilayah termasuk pedesaan didalamnya dan wilayah perkotaan di Kabupaten Ngawi yang dilakukan dengan pengembangan hirarki kawasan sistem perkotaan itu, berupa PKL, PKLp, dan PPK.

Tabel 4

#### Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan Wilayah

No	Kebijakan	Strategi Sistem Perkotaan Wilayah
1.	Pengembangan struktur dan fungsi perkotaan yang mendukung agropolitan, beserta industri dan perdagangan pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan perkotaan utama Kabupaten Ngawi sebagai pusat kegiatan lokal di Perkotaan Ngawi.</li> <li>• Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Ngawi sebagai perkotaan yang menunjang</li> </ul>

		<p>perkembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pengembangan Perkotaan Ngrambe sebagai perkotaan dengan fungsi utama transportasi dan agropolitan.</li> <li>• Mendorong Perkotaan Bringin sebagai perkotaan dengan fungsi utama sebagai kawasan perikanan.</li> </ul>
2.	<p>pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di Kabupaten Ngawi yang mendukung agropolitan, beserta industri dan perdagangan pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan peran Perkotaan Ngawi sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).</li> <li>• Mengembangkan wilayah perkotaan kecamatan yang memiliki kemampuan pelayanan terhadap kecamatan lainnya sebagai pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Karangjati, Widodaren dan Ngrambe.</li> <li>• Mengembangkan perkotaan ibukota kecamatan lainnya sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) yaitu ibukota Kecamatan Karanganyar, Pitu, Kasreman, Bringin, Padas, Pangkur, Kwadungan, Geneng, Gerih, Kendal, Jogorogo, Sine, Kedunggalar, Paron, dan Mantingan.</li> <li>• Mengembangkan desa-desa yang berada di luar pengaruh secara langsung perkembangan wilayah kota di Ibukota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Ngawi, dan memiliki akses berupa jalan lokal primer atau jalan desa dan bisa menjadi pusat pengembangan lingkungan (PPL) yang bisa menjadi pendukung pengembangan desa-desa lainnya.</li> </ul>

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

Pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara berjenjang mulai dari ibukota Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Rencana pembangunan sistem pusat pelayanan di Kabupaten Ngawi dilakukan sebagai usaha pemerataan penyebaran pembangunan Kabupaten Ngawi dilakukan sebagai usaha skala besar akan terjadi di Kabupaten Ngawi dengan pembentukan kawasan agropolitan dan jasa pariwisata.

Tabel 5

Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Wilayah

No	Kebijakan	Strategi Fungsi Wilayah
1.	Penetapan fungsi wilayah pedesaan melalui pengembangan produk pertanian unggulan pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan fungsi wilayah pedesaan melalui pengembangan produk pertanian unggulan pedesaan</li> <li>• Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil. Mendorong ekspor hasil pertanian unggulan daerah</li> <li>• Mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Bringin</li> </ul>
2.	Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan intensif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produktivitas pertanian</li> <li>• Mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan</li> </ul>

		dan perluasan jaringan pemasaran
--	--	----------------------------------

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

Prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan mengarahkan pada Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama (KTU) sedangkan untuk Kota Tani (KT) dan Kawasan Sentra Produksi (KSP) adalah desa-desa disekitarnya dan desa-desa di Kecamatan Sine, Kecamatan Jogorogo, dan Kecamatan Kendal. Serta mengembangkan sistem informasi dan teknologi pertanian berupa Balai Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian (BP2TP) di Kecamatan Ngrambe (sebagai kota tani utama). Tugas pokok BP2TP adalah menyusun program-program penelitian yang diperlukan dalam pengembangan kegiatan agribisnis. Salah satunya adalah pengkajian tentang bibit unggul komoditas pertanian dan perikanan yang dibudidayakan di kawasan agropolitan dan perikanan.

### 3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Kabupaten Ngawi memiliki peran penting dalam skala regional, dengan demikian pengembangan Kabupaten Ngawi sangat berkaitan dengan berbagai pengembangan infrastruktur pendukungnya diantaranya Pengembang Sistem Jaringan Sarana dan Prasaran Wilayah, dimana pengembangan prioritas jaringan sarana dan prasarana wilayah guna untuk mendukung kegiatan pertanian, industri, dan perdagangan terutama pada kawasan agropolitan dan jasa pariwisata serta agroindustri. Menata sistem sarana dan prasarana wilayah secara hierarki dan merata untuk

mengembangkan sistem jaringan transportasi yang mendorong interaksi kegiatan antar wilayah pengembangan, mendorong pemerataan pembangunan, dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi.

#### 4. Kebijakan dan Strategi Penataan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pola ruang wilayah Kabupaten Ngawi mencakup kawasan lindung dan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Kawasan budidaya hutan produksi dan lahan pertanian tanaman pangan harus tetap dipertahankan.

Tabel 6

#### Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Ngawi

No	Kebijakan	Strategi Penetapan Kawasan Strategis
1.	Pengendalian perkembangan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan batas pengaruh kawasan strategis Kabupaten Ngawi.</li> <li>• Menetapkan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan.</li> </ul>
2.	Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Ngrambe bagi Agropolitan dan Kawasan Beringin sebagai Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar.</li> <li>• Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.</li> <li>• Menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan Perikanan Beringin meliputi Kecamatan Beringin dan sekitarnya.</li> <li>• Mengembangkan SDM di kawasan</li> </ul>

		<p>Agropolitan dan Perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kelembagaan di kawasan Agropolitan dan Perikanan</li> </ul>
3.	Pemantapan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>• Memanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.</li> <li>• Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung.</li> <li>• Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung</li> </ul>

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

5. Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Ngawi yang harus dikembangkan secara optimal, tetapi tidak boleh meninggalkan prinsip keberlanjutan dalam jangka panjang, diantaranya :

a. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan.

Mengembangkan permukiman pedesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman pedesaan dan perkotaan untuk pemerataan penyebaran penduduk. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan pedesaan. Mengembangkan perumahan terjangkau. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan. Mengembangkan Kasiba/Lisiba mandiri.

b. Pengembangan kawasan pertanian.

Menjaga luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Ngawi secara keseluruhan tidak boleh berkurang. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis pada kawasan

perkotaan yang tidak dapat menghindarkan alih fungsi sawah sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang. Menjaga saluran irigasi agar tidak diputus atau disatukan dengan drainase, dan harus menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi. Memberikan insentif pada pengelola lahan yang ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan, pertanian tanaman pangan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain. Untuk mengembangkan lumbung desa modern, menjalin kemitraan dengan masyarakat. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan pengairan. Mengembangkan sistem mina padi. Mengembangkan kerjasama antar daerah terutama wilayah dalam satu DAS dan yang memiliki satu sistem irigasi sebagai upaya mencapai lumbung padi Jawa – Bali. Peningkatan kualitas pertanian, meningkatkan pengelolaan tanah pertanian untuk tetap subur. Menyediakan pupuk, bibit dan obat-obat tanaman untuk memperoleh hasil yang bagus.

Menurut Indah Kusuma Wardani, BAPPEDA memiliki peran yang penting dalam melindungi lahan pertanian karena BAPPEDA merupakan Badan yang merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sehingga dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan, BAPPEDA akan melakukan mengenai tingkat produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Ngawi. Ketua BAPPEDA juga mengungkapkan upaya yang harus dilakukan yaitu :

- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak

menimbulkan masalah dalam pembangunan tersebut, seperti terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang ada.

- Melakukan pengawasan alih fungsi lahan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi, jadi apabila ada hal yang tidak sesuai dengan Perda tersebut dapat dikenakan sanksi. Salah satu peran BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian adalah dengan mengkoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan agar pembangunan harus sesuai dengan Perda yang berlaku, sehingga lahan-lahan pertanian yang produktif tidak terganggu dengan adanya evaluasi yang dilakukan. Dalam melindungi lahan pertanian produktif BAPPEDA melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian, tujuan dari hal tersebut adalah mempertahankan lahan pertanian yang produktif sebagai sumber penghasilan masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Ngawi dalam sistem perekonomian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Indah Kusuma Wardani Selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, tanggal 13 juli 2018

Berikut adalah hasil dari perkembangan di sektor Pertanian :

Tabel 7

Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Ngawi

<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (Ha)</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Produktivitas (Ton/Ha)</b>
2011	105,874	572,984	5.41
2012	116,261	708,694	6.10
2013	120,929	770,125	6.36
2014	121,525	731,523	6.02
2015	122.870	753,285	6.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

c. Pengembangan agropolitan, agroindustri dan perikanan pada kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan agropolitan, agroindustri dan perikanan. Mengembangkan jaringan infrastruktur. Meningkatkan mutu dan kualitas bahan baku. Mengembangkan program dan kerjasama dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan untuk kualitas ekspor.

d. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan perdagangan.

Mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan

perikanan. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan ukiran kayu jati. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi. Mengembangkan kawasan industri secara khusus.

Peraturan Daerah tentang proses pelaksanaan program tata ruang terhadap industri dan perdagangan yang ada di Kabupaten Ngawi dalam penataan wilayah yang meliputi :

1. Proses pengelolaan penataan pembangunan industri.
2. Proses pengembangan pembangunan industri.
3. Program penyiapan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan.

Program pengembangan dan pembinaan industri kecil dan usaha kecil kecil, menengah.

Pengelolaan penataan pembangunan industri dilakukan berdasarkan golongan kawasan industri yang ada pengelolaan ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah dalam hal tata ruang wilayah yang digunakan untuk kawasan industri. Dalam proses pengelolaan penataan pembangunan industri harus ada upaya pengelolaan kawasan industri dilakukan dengan :

- Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis.
- pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.

- Pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius/jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan disekitarnya.

Berikut adalah daftar industri yang ada di kabupaten ngawi :

Tabel 8

Data Jumlah Industri di Kabupaten Ngawi

<b>Subsektor Industri</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,647	1,659	1,678	1,697
Tekstil, Pakaian jadi, dan Barang Dari Kulit	315	315	315	315
Barang Kayu dan Sejenisnya	8,552	8,591	8,633	8,642
Kertas dan Barang cetakan	28	28	29	29
Kimia dan Barang dari Karet/Plastik	10	10	11	11
Semen dan Barang Galian Bukan Logam	2,477	2,477	2,477	2,477
Logam Dasar Besi dan Baja	317	317	317	317
Barang Dari Logam, Mesin, dan Alat Angkut	-	-	-	-

Pengolahan Lainnya	2,297	2,573	2,871	3,045
Jumlah	15, 643	15,970	16,331	16,533

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

e. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan.

Mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya ekspor. Melestarikan kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung. Mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat.

f. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan.

Mengembangkan peternakan dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya ekspor. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil peternakan. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan. Mengembangkan *breeding centre*.

g. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan.

Mengembangkan perikanan dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya ekspor. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perikanan. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat. Mengembangkan sistem mina padi.

Berdasarkan data diatas tentang industri dan perdagangan. Menurut Drs. Mohk. Sodiq Triwidiyanto, Msi, Untuk menjadi daerah yang memiliki daya tarik investasi perlu dipertegas dengan gencarnya promosi investasi, penggalan potensi unggulan daerah, fokus kegiatan sektoral yang menjadi pemicu dan memiliki multiplier besar, seperti kegiatan perdagangan dan industri yang bertumpu pada potensi pertanian. Struktur perekonomian Kabupaten Ngawi merupakan struktur ekonomi pertanian (primer), yang didukung oleh potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kegiatan investasi di Kabupaten Ngawi ke depan sangat diperlukan untuk mengembangkan dunia usaha masyarakat dan menguatkan struktur ekonomi Kabupaten Ngawi. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan daerah karena sektor ini memiliki kontribusi sektoral tertinggi (melebihi 40 persen) dan menyerap kurang lebih 63 persen dari total penduduk yang bekerja.<sup>44</sup>

Makin menguatnya kegiatan investasi daerah seiring dengan semakin membaiknya sarana dan prasarana daerah. Ada wilayah-wilayah kecamatan yang berkembang pesat dan ada yang tepat kurang mengalami perubahan, hal ini jika dibiarkan akan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Wilayah kecamatan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk relatif tinggi akan menghadapi permasalahan kota seperti urbanisasi, pedagang kaki lima, kebersihan dan persampahan serta sanitasi kota.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Mohk. Sodiq Triwidiyanto, Msi Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, tanggal 12 juli 2018

Kabupaten Ngawi memiliki kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan umum dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Dengan semakin berkembangnya wilayah perkotaan Kabupaten Ngawi di satu sisi dan tuntutan sarana prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat diperlukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah yang terpadu dan komprehensif. Sarana prasarana transportasi umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah dan yang menghubungkan kota dengan daerah di sekitarnya melalui wilayah-wilayah perbatasan dapat mendorong mempercepat perkembangan wilayah secara merata.

**D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030.**

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Ngawi. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), yang pelaksanaannya melalui Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jawa Timur. Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya.<sup>45</sup>

- b. Di dalam perencanaan RTRW Kabupaten Ngawi merupakan kawasan yang diunggulkan oleh Provinsi Jawa Timur di sektor pertanian dalam mengembangkan ekonomi di bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Sehingga upaya peningkatan berbagai sarana infrastruktur mendapat perhatian utama, dimana peningkatan infrastruktur akan menambah peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, serta pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Ngawi.<sup>46</sup>
- c. Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah yang bertujuan untuk mengoptimalkan Perda tersebut.
- d. Keaktifan dari implementator dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Ngawi.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sumber daya manusia mempunyai peran penting. Kurangnya sumber daya manusia merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Ngawi.

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Mohk. Sodik Triwidiyanto, Msi Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, tanggal 12 juli 2018

<sup>46</sup>Wawancara dengan Indah Kusuma Wardani Selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, tanggal 13 juli 2018

- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Peraturan Daerah mengenai RTRW dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. Berdasarkan penelitian ini masyarakat masih belum paham tentang fungsi RTRW, belum optimalnya komunikasi antara pihak terkait / instansi terkait (Pemerintah Daerah) dengan masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW tersebut.
- c. Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Ngawi, yang membuat pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RTRW tidak berjalan dengan maksimal.<sup>47</sup>

#### **E. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2030**

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan sumber daya manusia maupun pertumbuhan alami. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi.

Permasalahan penataan ruang muncul pada sektor Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi yang disusun pada

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Indah Kusuma Wardani Selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, tanggal 13 juli 2018

tahun 2010 belum berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh inkonsistensi dalam penataan ruang. Penelitian ini mencoba melihat konsistensi penataan ruang serta kaitannya dengan kinerja pembangunan wilayah, metode yang digunakan adalah wawancara dan mengambil data dari instansi terkait dalam RTRW tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penataan ruang yang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan kinerja pada instansi-instansi terkait atau implementator (PEMDA, BAPPEDA) pada Perda RTRW tersebut. Permasalahan yang harus mendapat perhatian lebih adalah infrastruktur, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi.

Ketiga sektor tersebut yaitu Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi trisula tulang punggung dalam perekonomian di Kabupaten Ngawi. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi, seperti yang di sebutkan dalam isi Pasal 3 : “Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan”. Masih belum terlaksananya pasal tersebut dengan optimal, bisa dilihat dengan munculnya berbagai permasalahan diantaranya : 1) Banyak terjadi alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi kawasan terbangun, yang berarti bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian. 2) Kualitas dan hasil pengolahan belum optimal. 3) Banyaknya lahan sawah yang dilanda banjir sehingga sering kali mengakibatkan gagal panen dan hasil panen yang kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap produksi pertanian. 4) Industri yang

ada tersebar ke beberapa lokasi sehingga kawasan industri kurang berkembang dan penggunaan lahan menjadi kurang efisien. 5) Keterbatasan modal dan keahlian mengakibatkan industri-insudtri kecil (*home industry*) tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar.

Diperlukan adanya evaluasi kinerja segera dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, agar pembangunan dan pengembangan wilayah dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah. Sehingga lahan-lahan pertanian yang produktif tidak terganggu, serta perkembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Ngawi dapat berjalan dengan optimal. Didukung dengan pengawasan yang dilakukan oleh PEMDA dan BAPPEDA melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor tersebut, tujuan dari hal itu adalah mempertahankan sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, karena sebagai sumber penghasilan masyarakat serta merupakan sektor unggulan Kabupaten Ngawi dalam sistem perekonomian.